



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363

EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---



## **Evaluasi Kesejahteraan Sosial 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf (2019-2021)**

### **Pendahuluan**

Masyarakat yang sejahtera menjadi indikasi keberhasilan suatu negara dalam memakmurkan rakyatnya. Berlandaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya<sup>1</sup>. Dari pengertian tersebut hal – hal itulah yang selayaknya masyarakat dapatkan. Namun, nyatanya, masih banyak masyarakat yang sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Belum lama ini, tanggal 15 Juli 2021, BPS merilis laporan bahwa pada Maret 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta penduduk Indonesia berstatus miskin. Tingkat kemiskinan Maret 2021 ini sedikit turun dari September 2020 namun masih lebih tinggi dibandingkan kondisi sebelum pandemi pada September 2019<sup>2</sup>. Lagi – lagi hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan yang masih tidak merata.

Jalannya proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat tentu memerlukan *will* yang serius dari pihak pemerintah. Seperti yang telah tercatat pada pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke empat, “*negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*” menunjukkan peran negara untuk melindungi hak – hak dari masyarakatnya. Pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini juga terdapat masalah dimana belum optimalnya

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012

<sup>2</sup> bps.go.id. (2021, Juli 15). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen*. Retrieved Oktober 15, 2021, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363  
EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

dukungan dari sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, di sini lah peran pemerintah untuk menyediakan pelayanan sosial seperti Rehabilitasi sosial, Pemberdayaan sosial, Perlindungan sosial, dan sebagainya sehingga dapat mempercepat terjadinya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat<sup>3</sup>. Tetapi tentu saja masyarakat pun perlu turut andil dengan cara mendukung dan mengikuti program tersebut.

### **Kesejahteraan Sosial Masyarakat Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf: Sebuah Gambaran Ikhtisar**

Dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia, kita bisa melihat dari beberapa indikator seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, perumahan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Tapi disini yang menjadi penekanan dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 4 hal, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan teknologi informasi dan komunikasi<sup>45</sup>. Indikator yang dapat dilihat adalah aspek ekonomi masyarakat dari angka kemiskinan Indonesia di tahun 2019, 2020, dan 2021 serta Pendapatan per kapita rata-rata warga Indonesia di tahun 2019, 2020, dan 2021.

#### **1. Pendidikan**

##### **a. 2019**

Di tahun 2019, jumlah partisipasi pendidikan menurut jangka umur dapat dibagi menjadi 4 jangka umur. Di jangka umur 16-18 tahun adalah 71.92%, di jangka 13-15

---

<sup>3</sup> Kemenkeu.go.id. (n.d.). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/39TAHUN2012PPPenjel.htm>

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik. (2019, November 22). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/22/1dfd4ad6cb598cd011b500f7/statistik-kesejahteraan-rakyat-2019.html>

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik. (2020, November 23). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/23/8838aec3d69e019d5fce6779/statistik-kesejahteraan-rakyat-2020.html>



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



*SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363*

*EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)*

---

tahun adalah 95.43%, di jangka 7-8 tahun adalah 99.17%, dan di jangka 5-6 tahun adalah 20.82%. Menurut jenjang pendidikan formal, 97.58% mengikuti Sekolah Dasar, 79.35% mengikuti Sekolah Menengah Pertama, dan 60.70% mengikuti Sekolah Menengah Atas.

b. 2020

Di tahun 2020, jumlah partisipasi pendidikan menurut jangka umur dapat dibagi menjadi 4 jangka umur. Di jangka umur 16-18 tahun adalah 71.44%, di jangka 13-15 tahun adalah 95.52%, di jangka 7-8 tahun adalah 99.21%, dan di jangka 5-6 tahun adalah 19.15%. Menurut jenjang pendidikan formal, 97.65% mengikuti Sekolah Dasar, 80.02% mengikuti Sekolah Menengah Pertama, dan 61.03% mengikuti Sekolah Menengah Atas.

2. Kesehatan

a. 2019

Di tahun 2019, 41.88% penduduk berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan, 15.38% adalah angka kesakitan penduduk indonesia, dan 40.11% penduduk yang sakit paling banyak rawat jalan ke praktek dokter/bidan.

b. 2020

Di tahun 2020, 44.82% penduduk berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan, 14.64% adalah angka kesakitan penduduk indonesia, 38.34% penduduk yang sakit paling banyak rawat jalan ke praktek dokter/bidan.

3. Perumahan

a. 2019



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



*SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363  
EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)*

---

Di tahun 2019, 38.25% rumah tangga minum dari air isi ulang dan 89.27% memiliki akses air minum yang layak. 35.04% rumah tangga menggunakan air sumur dan 98.85% rumah tangga sudah menggunakan listrik.

b. 2020

Di tahun 2020, 39.34% rumah tangga minum dari air isi ulang dan 90,21% memiliki akses air minum yang layak. 39,20% rumah tangga menggunakan air sumur dan 98.98% rumah tangga sudah menggunakan listrik.

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi

a. 2019

Ada 14,47% dari penduduk 5 tahun ke atas Indonesia menggunakan komputer dalam 3 bulan terakhir (Dihitung dari rilis dokumen Statistik Kesejahteraan 2019). 75,57% penduduk 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler nirkabel dalam 3 bulan terakhir (Dihitung dari rilis dokumen Statistik Kesejahteraan 2019), dan 47,69% penduduk 5 tahun ke atas mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (Dihitung dari rilis dokumen Statistik Kesejahteraan 2019).

b. 2020

Ada 13,61% dari penduduk 5 tahun ke atas menggunakan komputer dalam 3 bulan terakhir (Dihitung dari rilis dokumen Statistik Kesejahteraan 2020) dan 4,52% menggunakan laptop. 98,31% penduduk 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler nirkabel dalam 3 bulan terakhir (Dihitung dari rilis dokumen Statistik Kesejahteraan 2020), dan 53,75% penduduk 5 tahun ke atas mengakses internet dalam 3 bulan terakhir (Dihitung dari rilis dokumen Statistik Kesejahteraan 2020).



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363  
EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

Melihat dari indikator yang disediakan oleh BPS, kita bisa melihat bahwa dari 4 indikator yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan, dan teknologi informasi dan komunikasi, kesejahteraan sosial masyarakat meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Tetapi dari perspektif indikator perekonomian, hal ini lebih berbeda. Dalam mengkaji kesejahteraan ekonomi, indikator yang akan dipakai adalah angka kemiskinan dan pendapatan per kapita.

### 1. Angka Kemiskinan

Di September 2019, angka kemiskinan di Indonesia adalah 9,22%<sup>6</sup>. Tetapi angka ini meningkat di September 2020 menjadi 10,19%<sup>7</sup>. Angka ini menurun kembali sebanyak 0,05% menjadi 10,14% di Maret 2021<sup>8</sup>.

### 2. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita penduduk Indonesia di tahun 2019 sebesar US\$ 4,050. Angka ini turun menjadi US\$ 3,870 di tahun 2020<sup>9</sup>. Hal ini menyebabkan Indonesia turun kembali menjadi negara menengah, karena batas menjadi negara menengah ke atas menurut Bank Dunia adalah pendapatan per kapita yang berjumlah US\$ 4,096<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Widyastuti, R. A. (2020, Januari 15). *BPS: Angka Kemiskinan September 2019 Turun jadi 9,22 Persen*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1295394/bps-angka-kemiskinan-september-2019-turun-jadi-922-persen>

<sup>7</sup> Arnani, M. (2021, Februari 18). *Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Provinsi*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>

<sup>8</sup> Ulya, F. N. (2021, Juli 15). *BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Hingga Maret 2021*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/07/15/143633326/bps-ada-2754-juta-penduduk-miskin-di-indonesia-hingga-maret-2021?page=all>

<sup>9</sup> Pink, B. (2020, Juli 9). *Pendapatan per kapita Indonesia turun, ini kata Faisal Basri*. Diambil kembali dari Kontan.Id: <https://newssetup.kontan.co.id/news/pendapatan-per-kapita-indonesia-turun-ini-kata-faisal-basri-1>

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021, Juli 8). *Pemerintah Bekerja Keras Naikkan Pendapatan per Kapita*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-bekerja-keras-naikkan-pendapatan-per-kapita/>



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



*SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363  
EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)*

---

Dari kedua data ini, kita bisa menyimpulkan bahwa secara non-ekonomis, kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Akan tetapi, secara ekonomis, hal ini berbeda, pandemi Covid-19 menyebabkan yang menurunkan ekonomi Indonesia juga berdampak ke angka kemiskinan serta pendapatan masyarakat Indonesia. Sehingga meskipun kualitas hidup meningkat, pendapatan dan keuangan masyarakat semakin menurun.

### **Korupsi dan Kesejahteraan Sosial**

Korupsi dalam praktiknya banyak memiliki dampak ke berbagai aspek yang ada, mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan yang lainnya<sup>11</sup>. Pada aspek budaya korupsi berdampak negatif karena jika korupsi terus terjadi di masyarakat sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai kebiasaan. Jika masyarakat menganggap korupsi sebagai tindakan yang biasa saja, maka akan banyak individu yang melanggar norma anti-korupsi ataupun yang melakukan korupsi tanpa merasa bersalah<sup>12</sup>. Terlihat di Indonesia masyarakatnya permisif terhadap korupsi dan para koruptor cenderung tidak mendapatkan sanksi sosial yang berat. Cara pandang seperti itu dapat membuat tingkat korupsi tinggi.

Korupsi juga berdampak langsung terhadap perekonomian. Sand the wheel hypothesis (SWH) berpendapat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian<sup>13</sup>. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan perekonomian nasional. Hal ini juga berkorelasi dengan terjadinya ketimpangan pendapatan, kemiskinan, sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak berkualitas, dan kelembagaan pemerintah yang buruk. Adanya kasus suap, pungli dalam suatu lembaga tentu mempengaruhi kualitas lembaga tersebut. Dengan terjadinya kasus – kasus seperti itu menggambarkan sistem lembaga yang buruk. Begitu pula dengan kualitas infrastruktur, banyak kasus korupsi dana pembangunan infrastruktur terjadi. Saat dana tersebut

---

<sup>11</sup> KPK. (2016). Modul 3 Dampak Sosial Korupsi.

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> ibid



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363  
EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

dikorupsi maka dana untuk pembangunan akan berkurang dan infrastruktur yang dihasilkan kualitasnya tentu akan menurun.

Lalu bagaimana dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan ? sudah menjadi rahasia umum di Indonesia ini bagaimana ketimpangan pendapatan bisa terjadi. Ketika si kaya semakin kaya dan si miskin akan semakin miskin. Tindakan korupsi tentu mendukung teori tersebut. Contohnya kasus korupsi dana bansos pandemi covid-19 oleh mantan menteri sosial Juliari Batubara beberapa waktu lalu<sup>14</sup>. Tujuan diadakannya bansos atau bantuan sosial adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19, alih – alih seluruh dana dikucurkan untuk masyarakat ternyata Juliari dan beberapa pelaku lainnya menggunakan sistem *fee* dalam proses pelaksanaan. KPK menyatakan *fee* yang didapatkan Juliari terkumpul sebanyak 17 miliar dan digunakan untuk keperluan pribadinya. Dapat dilihat dari peristiwa ini dimana mantan mensos Juliari mendapatkan 17 miliar dari uang yang seharusnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan<sup>15</sup>. Sedangkan rakyat dalam bansos ini mungkin hanya menerima bantuan senilai puluhan atau ratusan ribu saja dalam paket sembako yang diberikan. Inilah mengapa korupsi dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan.

Seluruh dampak yang disebabkan oleh korupsi di atas tentu berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Ketika tingkat ekonomi rendah, kemiskinan tinggi, ketimpangan pendapatan, kurangnya pemenuhan kebutuhan, tidak meratanya fasilitas maka kesejahteraan sosial dalam negara tersebut dapat disebut rendah karena tidak terpenuhi indikatornya.

---

<sup>14</sup> Kompas.com. (2021, Agustus 23). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Kompas.com. Retrieved Oktober 19, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>

<sup>15</sup> *ibid*





**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363

EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

## **Indeks Korupsi di Indonesia**

Angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020 menurun tiga poin dari tahun sebelumnya dan menduduki posisi ke-102 dari 180 negara<sup>16</sup>. Hal ini menunjukkan angka yang rendah dan tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020 juga dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19. Situasi ini menghadirkan krisis ganda, yakni krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Korupsi yang merusak pelayanan publik saat terjadi krisis juga berpotensi sepanjang penanganan Covid-19<sup>17</sup>. Disisi lain pemberantasan korupsi di seluruh sistem politik Indonesia diakui masih menjadi tantangan yang besar. Ditambah pula dengan adanya pelemahan KPK dengan pemecatan 57 anggota KPK<sup>18</sup>. Tahun ini ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat bahwa penanganan pemberantasan korupsi merosot pada era presiden Jokowi<sup>19</sup>. Selama periode ini pula tercatat berbagai kasus korupsi mulai dari pemerintah daerah hingga anggota kabinet seperti para menteri. Tercatat juga pada laporan yang dikeluarkan oleh ICW bahwa tingkat korupsi di Indonesia pada semester 1 tahun 2021 meningkat sebanyak 47,63% dan total kerugian negara sebanyak Rp 26,83 triliun<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> Transparency International. (2021, Januari 28). *Corruption Perceptions Index 2020*. Retrieved Oktober 19, 2021, from <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>

<sup>17</sup> Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178, (e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v7i1.717).

<sup>18</sup> Kompas.com. (2021, September 30). *57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Kami Tak Minta Mereka Disalurkan Jadi ASN di Tempat Lain* Kompas.com. Retrieved Oktober 19, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/30/16570001/57-pegawai-kpk-dipecat-abraham-saad-kami-tak-minta-mereka-disalurkan-jadi?page=all>

<sup>19</sup> CNN Indonesia. (2021, September 14). *ICW: Sejarah Catat Pemberantasan Korupsi Hancur di Era Jokowi*. [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913162122-12-693629/icw-sejarah-catat). Retrieved Oktober 19, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913162122-12-693629/icw-sejarah-catat>

<sup>20</sup> Annur, C. M. (2021, September 13). *databoks*. Retrieved from ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester 1 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>





**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363

EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

## **Korupsi dan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus**

Indonesia di kala pandemi tetap dipenuhi dengan kasus-kasus yang makin merugikan masyarakat di saat masyarakat sedang berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Korupsi dimana-mana khususnya di salah satu hal yang menjadi alat bergantung masyarakat yaitu bantuan sosial membuat kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dua di antara banyak kasus ini adalah korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh Juliari Batubara dan kasus suap pembangunan rumah sakit di kala pandemi yang dilakukan oleh Wali Kota Cimahi.

### **1. Korupsi Bantuan Sosial (Bansos)**

Kasus korupsi bansos adalah salah satu kasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia dalam jangka pendek ini. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian I. M., dan Harry Sidabuke adalah 4 tersangka dari kasus ini. Juliari Batubara menerima suap sebanyak Rp14,5 miliar<sup>21</sup>. Tidak hanya itu, nilai bansos yang diberikan per paket yaitu 300,000 Rupiah, dikorupsi 10,000 Rupiah per paketnya<sup>22</sup>. Tidak hanya itu, penindaklanjutan kasus ini juga membuat amarah masyarakat berguncang. Sejak lama, ancaman hukuman mati selalu diberikan kepada mereka yang mengkorupsi bansos, Ketua KPK Firli Bahuri juga pernah mengancam koruptor akan terancam hukuman mati<sup>23</sup>. Tetapi, Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara tidak dikenakan hukuman mati, melainkan

---

<sup>21</sup> Sahara, W. (2021, Agustus 23). *Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>

<sup>22</sup> CNN Indonesia. (2021, Agustus 30). *Jejak Juliari, Menteri Korupsi Uang Jatah Rakyat Kala Pandemi*. Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210830133905-12-687308/jejak-juliari-menteri-korupsi-uang-jatah-rakyat-kala-pandemi>

<sup>23</sup> CNN Indonesia. (2021, Juli 29). *Kecap Firli soal Pidana Mati di Kasus Bansos Juliari*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729114354-12-673723/kecap-firli-soal-pidana-mati-di-kasus-bansos-juliari>



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363

EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

hanya mendapat hukuman 12 tahun penjara<sup>24</sup>. Tidak hanya itu, Julairi juga mendapatkan keringanan dari vonisnya karena, mengutip hakim Muhammad Damis, “sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat,” hal ini tentunya membuat masyarakat menilai hukuman Julairi terlalu ringan<sup>25</sup>.

## 2. Kasus Suap Rumah Sakit

Ajay Muhammad Priatna, Mantan Wali Kota Cimahi, melakukan korupsi dengan meminta suap sebesar Rp3,2 Miliar yang merupakan 10% dari total dana pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda tersebut yang berjumlah Rp32 Miliar<sup>26</sup>. Ajay meminta suap ini kepada pemilik RSU Kasih Bunda guna melancarkan permintaan izin pembangunan rumah sakit tersebut. Ajay sendiri sudah menerima Rp 1,6 Miliar dari Rp 3,2 Miliar yang dia minta<sup>27</sup>. Ajay, mendapatkan hukuman 2 tahun penjara, tetapi hal ini jauh lebih ringan dibandingkan yang diminta oleh jaksa KPK, yaitu 7 tahun<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> BBC News Indonesia. (2021, Agustus 23). *Julairi Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan'.* Diambil kembali dari BBC News:

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>

<sup>25</sup> Rizal, J. G. (2021, Agustus 24). *Vonis Ringan Julairi karena Di-bully, Pengamat: Harus Ada Sanksi Sosial.*

Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/24/160000265/vonis-ringan-julairi-karena-di-bully-pengamat-harus-ada-sanksi-sosial?page=all>

<sup>26</sup> CNN Indonesia. (2021, April 7). *Kasus Suap Proyek RS, Wali Kota Cimahi Ajay Segera Disidang.* Diambil kembali dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210407182401-12-627161/kasus-suap-proyek-rs-wali-kota-cimahi-ajay-segera-disidang>

<sup>27</sup> Ramadhan, A. (2021, Januari 14). *Kasus Suap Perizinan RS, KPK Dalam Pemberian Uang ke Wali Kota Cimahi.* Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/10464701/kasus-suap-perizinan-rs-kpk-dalam-pemberian-uang-ke-wali-kota-cimahi>

<sup>28</sup> Permadi, A. (2021, Agustus 25). *Terbukti Korupsi, Wali Kota Nonaktif Cimahi Ajay Priatna Divonis 2 Tahun Penjara.* Diambil kembali dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2021/08/25/134544578/terbukti-korupsi-wali-kota-nonaktif-cimahi-ajay-priatna-divonis-2-tahun?page=all>



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363

EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

## **Undang-Undang Cipta Kerja dan Kesejahteraan Sosial**

Indonesia sebagai negara dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 139,81 juta jiwa memiliki tanggungan untuk memberikan kesejahteraan kepada pekerja<sup>29</sup>. Jumlah angkatan kerja dengan jumlah besar tentunya akan berkorelasi langsung dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Indonesia sebagai negara *welfare state*<sup>30</sup> berarti memegang kunci dan mengembang tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, bahkan hal ini dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-IV dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

Pemerintah tentunya memiliki peran dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengaturan dan meningkatkan kualitas serta menjamin penyediaan kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat secara riil. Di sisi lain, pemerintah baru saja mengeluarkan produk kebijakan yang mengatur mengenai pekerja di Indonesia. Pemerintah baru saja mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan mengatur segala aspek pekerja. Tentunya hal ini akan memberikan pengaruh kepada pekerja dan kesejahteraan pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, secara tidak langsung kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan pekerja akan memberikan dampak kepada

---

<sup>29</sup> BisnisNews “Februari 2021. Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia Capai 139,81 Juta Orang” (<https://bisnisnews.id/detail/berita/februari-2021-jumlah-angkatan-kerja-di-indonesia-capai--13981-juta--orang>) Diakses pada 19 Oktober 2021)

<sup>30</sup> Weppy Susetiyo, Anik Iftitah “Peranan dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja” Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021, hal 92.



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363  
EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Undang-Undang Cipta Kerja yang dirancang dan disahkan oleh pemerintah tahun lalu tentunya akan memberikan dampak juga kepada kesejahteraan.

Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja merupakan salah satu hal yang disebut oleh Pak Presiden Ir. Joko Widodo ketika pidato pelantikannya. Beliau menyebut bahwa pada masa jabatannya, ia akan membahas dua undang-undang yang dimana ini merupakan salah satu undang-undang yang memang akan jadi fokus pembahasan. UU Cipta Kerja dimaksudkan untuk mengupayakan penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional<sup>31</sup>. Akan tetapi, dalam perkembangannya UU yang kontroversial ini lebih memandang dan mementingkan kepentingan investor, bukan para pekerja. Kebijakan yang tidak menguntungkan para pekerja ini akhirnya menuai kontroversi dan demonstrasi dimana-mana. Akan tetapi, tidak ada perubahan yang terjadi, melainkan percepatan pengesahan sehingga penerapan UU Cipta Kerja bisa disegerakan.

Potensi UU Cipta Kerja memberikan kerugian bagi para pekerja nya dapat dilihat dari berbagai macam substansi undang-undang yang telah dirumuskan. Adanya pengaturan baru terkait upah, kebijakan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, serta kebijakan jumlah hari libur membuat UU Cipta Kerja ini seolah bermata dua, dan lebih mungkin untuk merugikan para pekerja. Seperti hal nya kesejahteraan pekerja perempuan mengenai hak kesehatan reproduksi perempuan yang seharusnya diatur dalam UU Cipta Kerja yang menjadi suatu pembaharuan dari undang-undang sebelumnya yang belum mengatur tentang hal tersebut<sup>32</sup>. Hal sekecil ini akan mempengaruhi kesejahteraan, khususnya kesejahteraan pekerja pada umumnya. Di sisi lain, ada hal esensial yang

---

<sup>31</sup> JobStreet “Dampak UU Cipta Kerja pada Pekerja di Tahun 2021” (<https://www.jobstreet.co.id/career-resources/dampak-uu-cipta-kerja-ppada-pekerja-di-tahun-2021/> diakses pada 19 Oktober 2021)

<sup>32</sup> Muhamad Rizal, Dhyan Fateha Rhahima “The Influence of The Job Creation Act (Omnibus Law) on Welfare of Women Employees Pengaruh UU Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan” Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis, Volume V, Nomor 2, Tahun 2021, Hal 173.



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG

KM.21JATINANGOR 45363

EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

sangat mempengaruhi kesejahteraan pekerja. Yaitu adanya perubahan ketentuan terkait ketenagakerjaan dan pemberian uang pesangon. Pesangon yang sebelumnya sudah diatur dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang kemudian diubah sehingga menentukan sistematika pemberian pesangon yang baru dan berdampak pada pemangkasan. Hal ini semakin mendiskreditkan posisi pekerja yang saat ini belum menerima pesangon secara adil<sup>33</sup>. Selain hal tersebut, Omnibus Law UU Cipta Kerja ini merupakan suatu gebrakan baru yang akan memberikan pembaharuan terhadap sistem perundang-undangan di Indonesia. Pembaharuan Omnibus Law memberikan dampak yang sangat luas, terhadap aspek ekonomi, sosial, dan hukum bagi masyarakat Indonesia. Dimulai dari perumusan undang-undang yang bermasalah, prosedural yang kontroversial, hal ini justru menambah keresahan masyarakat akan keseriusan UU Cipta Kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja. Oleh karena itu, UU Cipta Kerja akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pekerja yang juga akan berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

### **Upaya Pemerintah di Kala Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 sangat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Baik dari bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan yang lainnya. Semua ini terdampak akibat pandemi Covid-19 yang sampai hari ini belum selesai. Dalam perjalanan penanggulangan pandemi, tentunya pemerintah menerapkan berbagai kebijakan dan upaya pemulihan kesejahteraan sosial yang terdampak. Khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi. Pemerintah pun menyusun Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang dibentuk dengan maksud agar terciptanya suatu badan yang berfokus pada upaya penanganan dan penanggulangan pandemi pada berbagai sektor. Upaya pertama yang pemerintah lakukan adalah membangun alur

---

<sup>33</sup> Fajar Kurniawan “*Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Kluster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK*” Jurnal Panorama Hukum, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2020, Hal. 70-72



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363  
EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

koordinasi dan birokrasi perihal penanganan bencana Covid-19 ini. Sinergitas akan masyarakat dan pemerintah menjadi kunci penanganan pandemi Covid-19, akan tetapi perlu adanya arahan yang jelas serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar masyarakat bisa turut serta menanggulangi situasi pandemi ini.

Dalam perkembangan kasus Covid-19, banyak regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna menghentikan penyebaran virus Covid-19. Upaya pemerintah untuk mempersempit penyebaran virus sejatinya merupakan upaya dalam menjaga stabilitas kesejahteraan kesehatan masyarakat di Indonesia, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah sejauh apa dan seserius apa kebijakan tersebut diterapkan guna menjadikan kesejahteraan kesehatan masyarakat menjadi tujuan utama. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah awal penerapan sistem *blocking* kedaerahan agar virus tidak menyebar dari satu daerah ke daerah lain. PSBB yang diterapkan pada saat itu memaksa masyarakat untuk diam dirumah, bahkan semua sektor baik sektor pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya terpaksa harus melakukan aktivitasnya dari rumah. Hal ini berpengaruh kepada stabilitas perusahaan yang akhirnya memaksa melakukan PHK terhadap pekerja, dan membuat angka pengangguran menjadi bertambah<sup>34</sup>. Selaras seperti yang dikatakan oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHIJSK) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri

*“Angka pengangguran meningkat dan jumlahnya sangat besar. Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan berbagai kebijakan dan tindakan nyata untuk menanggulangi kondisi ini,”*

Adanya kenaikan jumlah pengangguran ini menjadikan Pandemi Covid-19 berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini menambah peran pemerintah untuk berupaya menanggulangi situasi kondisi ekonomi dikala pandemi. Lantas pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menambal situasi ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja.

---

<sup>34</sup> Media Indonesia “*Pandemi Covid-19 Picu Kenaikan Angka Pengangguran*”  
(<https://mediaindonesia.com/ekonomi/425123/pandemi-covid-19-picu-kenaikan-angka-pengangguran> Diakses pada 19 Oktober 2021)





**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363

EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

Pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, salah satunya adalah bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah mengalokasikan anggaran secara khusus untuk melaksanakan program Bantuan Sosial yang dananya bersumber dari relokasi anggaran kementerian dan lembaga yang prioritas nya masih bisa ditangguhkan. Sejauh ini komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan dan jalan keluar dinilai sangat serius melalui keluarnya Rp. 62 Triliun untuk bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, keseriusan pemerintah ter delegitimasi ketika terjadi peristiwa korupsi dana Bantuan Sosial yang dilakukan oleh ex-Menteri Sosial, Juliari Batubara dan komplotan nya<sup>35</sup>. Tak tanggung-tanggung, korupsi yang dilakukan senilai Rp. 20,8 Miliar<sup>36</sup>. Peristiwa ini mencederai kesejahteraan masyarakat, dikarenakan adanya pemotongan dana yang seharusnya digelontorkan untuk kepentingan rakyat, dan masuk ke kantong kepentingan pribadi. Penyelewengan dana bansos menjadi ladang korupsi ini menjadi sebuah tanda tanya bagi masyarakat akan partisipasi pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di masa pandemi.

Banyak sektor yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Justru hal tersebut menjadi sebuah tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah. Konsistensi penanggulangan di bidang ekonomi seharusnya tidak mengesampingkan kesejahteraan kesehatan masyarakat. Kebijakan ekonomi guna pemulihan di masa pandemi juga seharusnya seirama dengan pemulihan kesehatan masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah memegang peran utama dalam melakukan riset dan implementasi kebijakan yang memberikan stimulus terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di segala situasi kondisi, termasuk pandemi ini.

---

<sup>35</sup> Launa, Hayu Lusianawati “Potensi Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19” Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2021, hal 1-22

<sup>36</sup> Kompas “Total Korupsi Bansos Covid-19 Diduga Rp 20,8 Miliar, Jatah Juliari Rp. 17 Miliar” (<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/11392211/total-korupsi-bansos-covid-19-diduga-rp-208-miliar-jatah-juliari-rp-17?page=all> Diakses pada 19 Oktober 2021)





**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



*SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363*

*EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)*

---

## **Penutup**

Sejatinya kesejahteraan masyarakat merupakan hal penting yang perlu diperhatikan lagi oleh negara. Bukan hanya masyarakat berstatus sosial tinggi tentunya, masyarakat – masyarakat kecil lah yang perlu perhatian khusus. Selama dua tahun ini memang Indonesia mengalami peningkatan tingkat kesejahteraan dalam aspek non – ekonomis namun berbeda jika dilihat dari aspek ekonomis yang secara signifikan menurun. Menurunnya kesejahteraan dalam aspek ekonomis diperburuk dengan keadaan pandemi Covid-19 yang masuk sejak awal tahun 2020 lalu. Pandemi membuat banyak sektor menurun terutama dalam hal pendapatan. Sehingga meskipun masyarakat memiliki kualitas hidup yang baik jika pendapatannya menurun, dan tingkat kemiskinan masih tinggi tetap saja belum bisa disebut sejahtera.

Hal lain yang menjadi rapor merah selama masa pemerintahan Jokowi – Ma'ruf ini adalah angka Indeks Persepsi Korupsi tahun 2020 yang menurun dari 40 menjadi 37 dan dinyatakan bahwa ini adalah posisi terendah yang pernah diduduki oleh Indonesia. Belum lagi ada upaya – upaya pelemahan KPK dengan pemecatan 57 anggota KPK yang memperlambat proses penanganan kasus korupsi yang terjadi. Kasus – kasus korupsi besar pun terjadi dalam 2 tahun terakhir ini, di antaranya adalah kasus korupsi dana bansos dan kasus suap rumah sakit. Jika dilihat dari programnya seperti bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi dan pembangunan rumah sakit sangat berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun lagi – lagi hal tersebut disalahgunakan.

Lalu jangan lupa Undang – undang Cipta Kerja yang baru setahun lalu disahkan. Dalam praktiknya kebijakan yang ada pada UU Cipta Kerja ini banyak merugikan para pekerja. Padahal dilihat dari fungsi awal UU ini diciptakan adalah untuk menguntungkan para pekerja dan pengusaha kecil – menengah (UMKM). Namun sayangnya seperti UU ini lebih menguntungkan pada investor dan perusahaan – perusahaan besar, dan akhirnya merugikan para pekerja. Kesejahteraan para pekerja yang minim tentu berkorelasi dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Bagaimana masyarakat kecil bisa sama – sama hidup sejahtera jika pengaturan



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



*SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363*

*EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)*

---

perundang – undangan yang ada terus merugikan. Hal –hal ini yang perlu menjadi evaluasi untuk ke depannya khususnya dalam kesejahteraan masyarakat.



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



*SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363*

*EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)*

---

## **Daftar Pustaka**

- Arnani, M. (2021, Februari 18). Angka Kemiskinan Indonesia Naik, Ini Data Per Provinsi. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/110300865/angka-kemiskinan-indonesia-naik-ini-data-per-provinsi?page=all>
- Badan Pusat Statistik. (2019, November 22). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2019/11/22/1dfd4ad6cb598cd011b500f7/statistik-kesejahteraan-rakyat-2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020, November 23). Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/23/8838aec3d69e019d5fce6779/statistik-kesejahteraan-rakyat-2020.html>
- BBC News Indonesia. (2021, Agustus 23). Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara, korban masak bantuan tak layak - 'Terpaksa kami olah, karena itu yang kami dapatkan'. Diambil kembali dari BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58301733>
- BisnisNews. (2021, Mei 6). Februari 2021. Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia Capai 139,81 Juta Orang. Retrieved from Bisnis News: <https://bisnisnews.id/detail/berita/februari-2021-jumlah-angkatan-kerja-di-indonesia-capai--13981-juta--orang>
- bps.go.id. (2021, Juli 15). Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen. Retrieved Oktober 15, 2021, from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363  
EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

CNN Indonesia. (2021, Agustus 30). Jejak Juliari, Menteri Korupsi Uang Jatah Rakyat Kala Pandemi. Diambil kembali dari CNN Indonesia:  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210830133905-12-687308/jejak-juliari-menteri-korupsi-uang-jatah-rakyat-kala-pandemi>

CNN Indonesia. (2021, April 7). Kasus Suap Proyek RS, Wali Kota Cimahi Ajay Segera Disidang. Diambil kembali dari CNN Indonesia:  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210407182401-12-627161/kasus-suap-proyek-rs-wali-kota-cimahi-ajay-segera-disidang>

CNN Indonesia. (2021, Juli 29). Kecap Firli soal Pidana Mati di Kasus Bansos Juliari. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210729114354-12-673723/kecap-firli-soal-pidana-mati-di-kasus-bansos-juliari>

CNN Indonesia. (2021, September 14). ICW: Sejarah Catat Pemberantasan Korupsi Hancur di Era Jokowi. [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com). Retrieved Oktober 19, 2021, from ICW: Sejarah Catat Pemberantasan Korupsi Hancur di Era Jokowi Baca artikel CNN Indonesia "ICW: Sejarah Catat Pemberantasan Korupsi Hancur di Era Jokowi" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913162122-12-693629/icw-sejarah-catat>

Izzati, R. A. (2021, Juli 7). Situasi Kemiskinan Selama Pandemi. Diambil kembali dari Smeru Research Institute: [https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi#:~:text=Tingkat%20kemiskinan%20Indonesia%20sedikit%20turun,22%25%20pada%20September%202019\).](https://smeru.or.id/id/content/situasi-kemiskinan-selama-pandemi#:~:text=Tingkat%20kemiskinan%20Indonesia%20sedikit%20turun,22%25%20pada%20September%202019).)

JobStreet . (n.d.). Dampak UU Cipta Kerja pada Pekerja di Tahun 2021. Retrieved from Jobstreet: <https://www.jobstreet.co.id/career-resources/dampak-uu-cipta-kerja-ppada-pekerja-di-tahun-2021/>



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363

EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2021, Juli 8). Pemerintah Bekerja Keras Naikkan Pendapatan per Kapita. Diambil kembali dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-bekerja-keras-naikkan-pendapatan-per-kapita/>

Kemenkeu.go.id. (n.d.). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/39TAHUN2012PPPEnjel.htm>

Kompas.com. (2021, September 30). 57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Kami Tak Minta Mereka Disalurkan Jadi ASN di Tempat Lain Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Kami Tak Minta Mereka Disalurkan Jadi ASN di Tempat Lain", Klik unt. Kompas.com. Retrieved Oktober 19, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/30/16570001/57-pegawai-kpk-dipecat-abraham-samad-kami-tak-minta-mereka-disalurkan-jadi?page=all>

Kompas.com. (2021, Agustus 23). Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara. Kompas.com. Retrieved Oktober 19, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>

Kompas. (2020, Desember 6). Total Korupsi Bansos Covid-19 Diduga Rp, 20,8 Miliar, Jatah Juliari Rp. 17 Miliar. Retrieved from Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/11392211/total-korupsi-bansos-covid-19-diduga-rp-208-miliar-jatah-juliari-rp-17?page=all>

KPK. (2016). Modul 3 Dampak Sosial Korupsi. KPK.

Kurniawan, F. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK. Jurnal Panorama Hukum, 70-72.



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



*SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363*

*EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)*

---

Launa, & Lusiniawati, H. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos di Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 1-22.

Media Indonesia. (2021, Agustus 12). Pandemi Covid 19 Picu Kenaikan Angka Pengangguran. Retrieved from Media Indonesia : <https://mediaindonesia.com/ekonomi/425123/pandemi-covid-19-picu-kenaikan-angka-pengangguran>

Permadi, A. (2021, Agustus 25). Terbukti Korupsi, Wali Kota Nonaktif Cimahi Ajay Priatna Divonis 2 Tahun Penjara. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2021/08/25/134544578/terbukti-korupsi-wali-kota-nonaktif-cimahi-ajay-priatna-divonis-2-tahun?page=all>

Pink, B. (2020, Juli 9). Pendapatan per kapita Indonesia turun, ini kata Faisal Basri. Diambil kembali dari Kontan.Id: <https://newssetup.kontan.co.id/news/pendapatan-per-kapita-indonesia-turun-ini-kata-faisal-basri-1>

Ramadhan, A. (2021, Januari 14). Kasus Suap Perizinan RS, KPK Dalami Pemberian Uang ke Wali Kota Cimahi. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/14/10464701/kasus-suap-perizinan-rs-kpk-dalami-pemberian-uang-ke-wali-kota-cimahi>

Rizal, M., & Rhahima, D. F. (2021). The Influence of The Job Creation Act (Omnibus Law) on Welfare of Women Employees Pengaruh UU Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan. *Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis*, 173.

Rizal, J. G. (2021, Agustus 24). Vonis Ringan Juliari karena Di-bully, Pengamat: Harus Ada Sanksi Sosial. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/24/160000265/vonis-ringan-juliari-karena-di-bully-pengamat-harus-ada-sanksi-sosial?page=all>



**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363  
EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)

---

Sahara, W. (2021, Agustus 23). Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>

Suyatmiko, W. H. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7(1), 161-178, (e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v7i1.717).

Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggung JAwb Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. Jurnal Supermasi, 92.

Transparency International. (2021, Januari 28). Corruption Perceptions Index 2020. Retrieved Oktober 19, 2021, from <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl>

Ulya, F. N. (2021, Juli 15). BPS: Ada 27,54 Juta Penduduk Miskin di Indonesia Hingga Maret 2021. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/07/15/143633326/bps-ada-2754-juta-penduduk-miskin-di-indonesia-hingga-maret-2021?page=all>

Widyastuti, R. A. (2020, Januari 15). BPS: Angka Kemiskinan September 2019 Turun jadi 9,22 Persen. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1295394/bps-angka-kemiskinan-september-2019-turun-jadi-922-persen>





**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



*SEKRETARIAT: GEDUNG STUDENT CENTRE LT 2 FISIP UNPAD – JL. RAYA BANDUNG – SUMEDANG  
KM.21JATINANGOR 45363*

*EMAIL : [BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM](mailto:BEMFISIPUNPAD2021@GMAIL.COM)*

---

**Penulis**

Muhammad Dziki Zainal Arifin      FISIP 2020

Shafa Aulia Nursani      FISIP 2020

Sultan Ananta Fikri      FISIP 2020